



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM " MITRA MANDIRI "
Sekretariat : Blok Tangsi Jl. Tegalagung Ds. Benda,
Kecamatan Karangampel – Kabupaten Indramayu

ULANGAN SUMATIF AKHIR SEMESTER 1

Mata Pelajaran : PPKN
Program : Paket C Kelas _____

Hari/Tanggal :
Waktu : 90 menit

1. Perhatikan pernyataan di bawah ini:
 - 1) Peraturan itu bersifat memaksa.
 - 2) Adanya perintah dan larangan.
 - 3) Peraturan dibentuk oleh badan-badan resmi yang memiliki kewenangan.
 - 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas dan nyata.Berikut ini yang *bukan* merupakan unsur-unsur norma hukum adalah
 - a. 1, 2, dan 4
 - b. 2 dan 3
 - c. 4 saja
 - d. 2 saja
 - e. 3 dan 4
2. Hukum yurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Hukum tersebut termasuk salah satu jenis hukum yang tergolong berdasarkan
 - a. sumbernya
 - b. bentuknya
 - c. visinya
 - d. masa berlakunya
 - e. tempat berlakunya
3. Pengadilan yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota adalah
 - a. pengadilan negeri
 - b. pengadilan tinggi
 - c. pengadilan agama
 - d. pengadilan militer
 - e. Mahkamah Agung
4. Mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kemajuan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan tersebut merupakan salah satu asas KPK, yaitu
 - a. kepastian hukum
 - b. kepentingan umum
 - c. akuntabilitas
 - d. keterbukaan
 - e. proporsionalitas
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komisi pemberantasan korupsi adalah
 - a. UU No. 30 Tahun 2002
 - b. UU No. 20 Tahun 2001
 - c. UU No. 39 Tahun 1999
 - d. UU No. 31 Tahun 1999
 - e. UU No. 32 Tahun 2004
6. Berikut ini yang *bukan* termasuk tujuan hukum adalah
 - a. mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat
 - b. untuk mencapai keadilan dan ketertiban
 - c. sebagai acuan dan penentu arah tujuan pembangunan
 - d. mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
 - e. memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat
7. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari
 - a. E.M. Meyers
 - b. S.M. Amin
 - c. E.Utrecht
 - d. J.C.T Simorangkir
 - e. Leon Duguit
8. Kitab undang-undang hukum pidana mengatur hal-hal berikut, *kecuali*
 - a. penahanan
 - b. pengadilan
 - c. penangkapan
 - d. penyitaan
 - e. cara penuntutan
9. Lembaga peradilan yang berhak memproses tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah
 - a. pengadilan militer
 - b. pengadilan tinggi
 - c. pengadilan umum
 - d. pengadilan tata usaha negara
 - e. pengadilan agama
10. Hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum acara termasuk dalam hukum
 - a. positif
 - b. materai
 - c. pembuktian
 - d. publik
 - e. formal

11. Hak asasi manusia yang menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat karena
- sudah dibawa sejak manusia itu lahir
 - diturunkan dari orang tua kandung
 - bersifat sangat pribadi dan ekskutif
 - merupakan eksistensi manusia bermartabat
 - dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
12. Pendapat yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan kita hadir, yang tanpa hak itu mustahil hidup sebagai manusia dikemukakan
- Komisi HAM PBB
 - John Locke
 - Aristoteles
 - Kuntjoro Poerbopranoto
 - UU No. 39 Tahun 1999
13. Hak-hak asasi politik (*political rights*) mencakup hal-hal berikut ini, *kecuali*
- ikut serta dalam pemerintahan
 - ikut memilih dalam kegiatan politik
 - mendirikan suatu partai politik
 - menjadi insan politik yang partisipatif
 - memimpin unjuk rasa ke gedung DPRD
14. Faktor aparat dan penindakannya (*law enforcement*) merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu berupa
- tidak taat asas dan aturan
 - prosedur kerja terbagi-bagi
 - sering memberikan kemudahan
 - waktu yang belum optimal
 - tingkat pendidikan heterogen
15. Pengakuan hak asasi manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* disetujui PBB pada tanggal
- 10 Desember 1948
 - 10 November 1948
 - 24 Oktober 1947
 - 24 Oktober 1946
 - 15 Agustus 1945
16. Bahan-bahan sebagai temuan komisi HAM PBB tentang pelanggaran HAM internasional oleh suatu negara anggota PBB selanjutnya disampaikan kepada
- Sidang Umum PBB
 - Dewan Keamanan PBB
 - Mahkamah Internasional
 - Dewan Ekonomi dan Sosial
 - Sekretaris Jenderal PBB
17. Salah satu upaya penegakan HAM di Indonesia, yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diatur dalam
- UU No. 5 Tahun 1998
 - Keppres No. 181 Tahun 1998
 - Keppres No. 129 Tahun 1999
 - UU No. 39 Tahun 1999
 - UU No. 26 Tahun 1999
18. Contoh bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain adalah
- tidak mengganggu orang yang sedang menjalankan ibadah
 - memberikan sumbangan korban bencana alam
 - selalu menjenguk apabila ada yang sakit
 - membiayai sekolah anak-anak yang putus sekolah
 - membantu fakir miskin
19. Hak asasi diakui seluruh masyarakat dunia dengan tujuan untuk
- menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi bangsa yang baru merdeka
 - menjunjung nilai-nilai kemanusiaan untuk negara yang sedang berkembang
 - menghormati kebebasan mengeluarkan pendapat bagi setiap bangsa
 - memberikan kebebasan kepada setiap bangsa yang sedang berkembang
 - menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan
20. Setiap manusia Indonesia wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, untuk itu dalam penggunaannya hendaknya
- harus berhati-hati agar tidak merugikan diri sendiri
 - bebas dari pengawasan pemerintah
 - disesuaikan dengan adat istiadat setempat
 - dapat disesuaikan dengan kepentingan masing-masing
 - memerlukan peraturan yang menjamin kebebasan penggunaan hak asasi

21. Secara umum warga negara dapat diartikan
- penduduk suatu negara
 - penghuni suatu negara
 - orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara
 - orang yang secara sah tinggal di suatu negara
 - orang yang tinggal sejak berdirinya negara
22. Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara Indonesia adalah
- semua penduduk asli Indonesia
 - orang yang tinggal di Indonesia sejak Indonesia merdeka
 - orang Indonesia asli dan semua keturunannya
 - orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
 - semua orang Indonesia asli maupun orang asing yang tinggal menetap di Indonesia
23. Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan penduduk adalah
- warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
 - semua orang yang tercatat sebagai warga negara Indonesia
 - orang-orang Indonesia asli beserta keturunannya
 - orang-orang yang memiliki kesetiaan terhadap negara Indonesia
 - semua orang yang ada di wilayah Indonesia
24. Penentuan sebagai warga negara atau bukan warga negara sangat penting, karena berakibat pada perbedaan
- status kependudukannya
 - hak dan kewajiban
 - status sosial
 - hukum yang berlaku
 - kesempatan berusaha dan bekerja
25. Asas *ius soli* artinya
- asas keturunan
 - asas tempat kelahiran
 - asas hukum kekerabatan
 - asas hukum keluarga
 - asas tempat tinggal
26. Di bawah ini cara mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, *kecuali*
- dikabulkan permohonannya
 - naturalisasi
 - pengangkatan
 - kelahiran
 - keturunan
27. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini ditegaskan dalam
- UUD 1945 pasal 26 ayat (2)
 - UUD 1945 pasal 27 ayat (1)
 - UUD 1945 pasal 28A
 - UUD 1945 pasal 28B
 - UUD 1945 pasal 29 ayat (1)
28. Secara fakta dan realita bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Dalam hal ini sikap kita terhadap perbedaan ini sebaiknya
- perbedaan harus dihilangkan karena dapat merusak integrasi bangsa
 - perbedaan dihilangkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit
 - perbedaan tetap dipertahankan
 - perbedaan dijadikan bahan diskusi ilmiah
 - perbedaan tidak ditonjol-tonjolkan dan dibesar-besarkan
29. Mengakui persamaan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat dapat diartikan
- mengakui keberadaan orang lain
 - bersedia menerima perbedaan dalam masyarakat
 - menghargai dan menghormati kelebihan orang lain
 - memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
 - berlaku sopan dan ramah kepada setiap orang
30. Dalam pandangan hukum semua warga negara dianggap sama. Hal ini berarti
- tiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di bidang hukum
 - tiap warga negara harus mengikuti proses hukum yang sama
 - tiap warga negara harus memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama
 - bagi semua warga negara berlaku peraturan perundang-undangan yang sama
 - tiap warga negara harus menerima semua ketentuan hukum yang ada

31. Pola tingkah laku individu dan orientasi kehidupan politik para anggota dalam sistem politik adalah pengertian
- partisipasi/peran serta politik
 - komunikasi politik
 - budaya politik
 - infrastruktur politik
 - struktur politik
32. Di bawah ini yang termasuk suprastruktur politik dalam negara adalah
- DPR
 - partai politik
 - LSM
 - kelompok penekan
 - kelompok kepentingan
33. Lembaga wakil rakyat dari daerah provinsi berdasarkan pemilu 2004 yang menjadi anggota MPR adalah
- DPRD I
 - DPR
 - DPD
 - DPRD II
 - Utusan Daerah
34. Jika suatu pemerintahan oleh seorang/sekelompok orang yang memonopoli kekuasaan dalam negara tanpa batas mencerminkan sistem politik
- terpimpin
 - demokrasi
 - totaliter
 - liberal
 - diktator
35. Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dikemukakan oleh
- John Locke
 - Montesquieu
 - Soekarno
 - Abraham Lincoln
 - Moh. Hatta
36. Maklumat tanggal 3 November 1945, isi pokoknya adalah
- KNIP berfungsi sebagai legislatif
 - parlemen tradisional
 - pembentukan multipartai
 - mengubah sistem presidensial menjadi parlementer
 - politik demokrasi liberal
37. Sistem politik Indonesia adalah
- | | |
|-----------------|------------------|
| a. liberal | d. Pancasila |
| b. sosialis | e. gotong royong |
| c. materialisme | |
38. Interest group yang didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur atau berkesinambungan, tetapi aktivitasnya hanya kelihatan dari luar apabila kepentingan masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak disebut dengan
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| a. interest group asosiasi | d. interest group yang anomik |
| b. interest group institusional | e. interest group yang non-anomik |
| c. Interest non-asosiasi | |
39. Sikap politik yang tidak menghendaki adanya perubahan situasi dan kondisi yang ada demi mempertahankan suatu rezim yang sedang berkuasa, merupakan sikap politik yang
- | | |
|---------------|------------|
| a. status quo | d. radikal |
| b. liberal | e. moderat |
| c. reaksioner | |
40. Komponen infrastruktur politik adalah
- | | |
|-------------|-------------------|
| a. MPR | d. partai politik |
| b. DPR | e. MK |
| c. Presiden | |